

PENDIDIKAN **ANTI** KORUPSI

(Menciptakan Masa Depan Tanpa Korupsi)

Apriani Riyanti, Ilham Ramadhan Ersyafdi, Murni Parembai,
Yanti Amelia Lewerissa, Supiati, M Zainul Hafizi, Achmad Surya,
Ujang Enas, Jose da Costa Magno, Maria Puspitasari, Zulkarnain Hamson



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI (MENCIPTAKAN MASA DEPAN TANPA KORUPSI)

Tim Penulis:

**Apriani Riyanti, Ilham Ramadhan Eryafdi, Murni Parembai,
Yanti Amelia Lewerissa, Supiati, M, Zainul Hafizi, Achmad Surya,
Ujang Enas, Jose da Costa Magno, Maria Puspitasari, Zulkarnain Hamson,**

Desain Cover:

Fawwaz Abyan

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Aas Masruroh

ISBN:

978-634-246-263-8

Cetakan Pertama:

September, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucapkan rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Pendidikan Anti Korupsi (Menciptakan Masa Depan Tanpa Korupsi)” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Pendidikan Anti Korupsi (Menciptakan Masa Depan Tanpa Korupsi).

Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu upaya strategis dalam membentuk karakter bangsa yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan ini, diharapkan tercipta kesadaran sejak dini akan bahaya korupsi serta pentingnya peran aktif setiap individu dalam mencegah dan memberantas tindakan koruptif di berbagai lapisan masyarakat.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan *“tiada gading yang tidak retak”* dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

September, 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KORUPSI	1
A. Pendahuluan.....	2
B. Pengertian Korupsi	3
C. Sejarah Anti Korupsi	4
D. Mengenal Pengertian Korupsi Dan Antikorupsi	5
E. Rangkuman Materi	16
BAB 2 DAMPAK KORUPSI PADA MASYARAKAT DAN NEGARA	19
A. Pendahuluan.....	20
B. Pengertian Korupsi	20
C. Bentuk dan Penyebab Korupsi.....	22
D. Dampak Korupsi Menurut Ahli	26
E. Dampak Korupsi Pada Masyarakat.....	27
F. Dampak Korupsi Pada Negara	28
G. Rangkuman Materi	33
BAB 3 TEORI DAN KONSEP ANTI KORUPSI.....	37
A. Pendahuluan.....	37
B. Teori-teori Korupsi.....	41
C. Penutup	45
D. Rangkuman Materi	45
BAB 4 PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SEKOLAH DASAR	49
A. Pendahuluan.....	50
B. Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini.....	52
C. Nilai-nilai Pembentuk Perilaku Antikorupsi.....	56
D. Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran PPKn	57
E. Rangkuman Materi	59
BAB 5 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI	63
A. Pendahuluan.....	64
B. Landasan Teoritis.....	65
C. Kebijakan & Kerangka Regulasi	66

D. Desain Kurikulum Pendidikan Anti-Korupsi	68
E. Pedagogi & Metodologi Inovatif	73
F. Peran Stakeholder Kampus	74
G. Evaluasi & Pengukuran Dampak	77
H. Tantangan, Hambatan, dan Mitigasi	78
I. Penutup	79
J. Rangkuman Materi	80
BAB 6 PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI LUAR SEKOLAH	87
A. Pendahuluan	88
B. Konsep Dasar Pendidikan Anti Korupsi	89
C. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi di Luar Sekolah	93
D. Metode dan Strategi Implementasi	96
E. Tantangan dan Solusi	101
F. Rangkuman Materi	107
BAB 7 KEBIJAKAN DAN REGULASI ANTI KORUPSI	113
A. Pendahuluan	114
B. Pengertian Kebijakan Anti Korupsi	114
C. Tujuan Kebijakan Anti Korupsi	118
D. Regulasi Anti Korupsi	120
E. Strategi Kebijakan Pemberantasan Korupsi	124
F. Rangkuman Materi	126
BAB 8 PERAN GURU DAN TENAGA PENDIDIK	131
A. Pendahuluan	132
B. Pemahaman Konsep Korupsi	133
C. Pengembangan Kesadaran Moral	134
D. Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi	135
E. Penggunaan Studi Kasus	135
F. Pengembangan Keterampilan Kritis	136
G. Penggunaan Sumber Belajar Yang Relevan	137
H. Pembentukan Sikap Kritis	137
I. Mendorong Aksi Positif	138
J. Pemodelan Perilaku	139
K. Evaluasi dan Umpan Balik	139
L. Rangkuman Materi	140

BAB 9 PERANAN INTERNASIONAL

DALAM PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI145

- A. Pendahuluan..... 146
- B. Kerja Sama Internasional Dalam Pendidikan Anti-Korupsi..... 147
- C. Pendekatan Global Dalam Pendidikan Anti-Korupsi 149
- D. Studi Kasus Program Internasional
Dalam Pendidikan Anti-Korupsi..... 151
- E. Tantangan dan Hambatan Dalam
Implementasi Pendidikan Anti-Korupsi Internasional..... 154
- F. Prospek dan Rekomendasi Untuk
Meningkatkan Peranan Internasional 155
- G. Kesimpulan 156
- H. Rangkuman Materi 162

BAB 10 MENGEMBANGKAN BUDAYA INTEGRITAS DI DALAM LINGKUGNAN PENDIDIKAN165

- A. Pendahuluan..... 166
- B. Memahami Integritas 168
- C. Integritas dalam Konteks Demokrasi..... 173
- D. Integritas dan Tata Kelola: Titik Tolak untuk Mengembangkan
Integritas dalam Dunia Pendidikan..... 178
- E. Rangkuman Materi 183

BAB 11 EVALUASI DAN MONITORING PENDIDIKAN ANTI KORUPSI187

- A. Pendahuluan..... 188
- B. Konsep Dasar Pendidikan Anti-Korupsi 192
- C. Evaluasi Pendidikan Anti-Korupsi 194
- D. Monitoring Pendidikan Anti-Korupsi 199
- E. Rangkuman Materi 203

GLOSARIUM206

PROFIL PENULIS211



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

(MENCIPTAKAN MASA DEPAN TANPA KORUPSI)

BAB 1: SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KORUPSI

Apriani Riyanti, M.Pd.

Universitas Binawan

BAB 1

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Anti korupsi adalah sikap dan tindakan yang menentang serta melawan segala bentuk korupsi. Ini mencakup berbagai upaya, baik preventif maupun represif, untuk mencegah, memberantas, dan mengurangi tindak pidana korupsi di berbagai sektor. **Antikorupsi** terdiri dari kegiatan-kegiatan yang menentang atau menghambat korupsi. Sama seperti korupsi yang mempunyai banyak bentuk, upaya pemberantasan korupsi juga mempunyai cakupan dan strategi yang berbeda-beda.^[1] Terkadang ada perbedaan umum antara tindakan preventif dan reaktif. Dalam kerangka tersebut, otoritas investigasi dan upaya mereka untuk mengungkap praktik korupsi akan dianggap reaktif, sedangkan pendidikan mengenai dampak negatif korupsi, atau program kepatuhan internal perusahaan diklasifikasikan sebagai preventif(Kurniawan, 2022).

Secara lebih rinci, anti korupsi dapat dipahami sebagai:

- **Tindakan Menentang:**
Melawan setiap bentuk penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, yang merugikan negara atau masyarakat.
- **Pencegahan:**
Meliputi pendidikan antikorupsi, pembentukan budaya antikorupsi, penerapan kebijakan yang transparan dan akuntabel, serta penguatan sistem pengawasan.
- **Pemberantasan:**
Meliputi penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, pengungkapan kasus korupsi, dan pemulihan aset negara yang dikorupsi. (Miftakhudin, 2019)

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Tiara Oktaviani dkk. (2020). *Korupsi yang Membudaya di Indonesia*. Pustaka Rumah Cinta.
- Kurniawan, R. (2022). Dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia dalam perspektif sejarah politik: komparasi Undang-Undang di Masa Orde Baru dan Masa Reformasi. *Historiography*, 2(1), 82. <https://doi.org/10.17977/um081v2i12022p82-92>
- Miftakhudin. (2019). Historiografi Korupsi di Indonesia. *Rihlah*, 7(2), 59–82.
- Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. (2011). *Anti-Korupsi Anti-Korupsi Pendidikan* (Y. K. Tim Editor: Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari (ed.)). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Rosikah, chatrina darul. (2019). *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi* (Issue February 2025).
- Rosikah, chatrina darul. (2023). *Pendidikan Anti Korupsi*. Sinar Grafika.
- SaThierbach, K., Petrovic, S., Schilbach, S., Mayo, D. J., Perriches, T., Rundlet, E. J. E. J. E. J., Jeon, Y. E., Collins, L. N. L. N., Huber, F. M. F. M., Lin, D. D. H. D. H., Paduch, M., Koide, A., Lu, V. T., Fischer, J., Hurt, E., Koide, S., Kossiakoff, A. A., Hoelz, A., Hawryluk-gara, L. A., ... Hoelz, A. (2022). Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas. In *Proceedings of the National Academy of Sciences* (Vol. 3, Issue 1). <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
- Widiatmika, K. P. (2025). Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi. *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning: Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16(2), 39–55.



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

(MENCIPTAKAN MASA DEPAN TANPA KORUPSI)

BAB 2: DAMPAK KORUPSI PADA MASYARAKAT DAN NEGARA

BAB 2

DAMPAK KORUPSI PADA MASYARAKAT DAN NEGARA

A. PENDAHULUAN

Bab ini mendeskripsikan mengenai salah satu tindakan kriminal yang belum dapat teratasi hingga saat ini di Indonesia yaitu korupsi. Secara spesifik yang akan dibahas pada bab ini mengenai dampak korupsi terhadap masyarakat dan negara. Namun, terdapat pula pembahasan mengenai pengertian, bentuk dan penyebab korupsi. Korupsi telah dijabarkan dari berbagai sumber dan juga telah dirincikan mengenai jenis perbuatan yang dapat diberikan sanksi pidana sebab masuk dalam kategori korupsi. Tanpa disadari munculnya korupsi ditengarai oleh istiadat bangsa atau budaya ketimuran yang menganggap wajar dan lumrah serta tumbuh di masyarakat sejak dahulu hingga saat ini (Ersyafdi & Ginting, 2024). Contoh dari istiadat/kebiasaan tersebut di antaranya para raja, sultan dan petinggi adat menerima upeti serta memberikan hadiah kepada kerabat, saudara dan keluarga di acara pesta ulang tahun, pernikahan dan kematian. Perkembangan kebiasaan ini terjadi secara cepat hingga lingkungan publik yaitu pegawai atau pejabat. Akhirnya praktik korupsi telah menjadi hal biasa di masyarakat bahkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hingga saat ini, tindak pidana korupsi terbagi ke dalam 30 jenis.

B. PENGERTIAN KORUPSI

Segala hal mengenai korupsi di Indonesia diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 yang kemudian diubah jadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengenai Tindak Pidana Korupsi. Pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dikembangkan dari beberapa pasal yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut

DAFTAR PUSTAKA

- Ersyafdi, I. R., & Ginting, R. (2024). Gratifikasi dalam Perspektif Mahasiswa Akuntansi: Dilema atau Problematika. *Akuras: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 17-34.
- Ersyafdi, I. R., & Sianturi, A. M. (2018). Pengaruh profesionalisme, kompetensi dan dukungan organisasi terhadap kinerja akuntan forensik lembaga pemeriksa keuangan negara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 171-190.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Kayo, Amrizal S. (2013). *Audit Forensik: Penggunaan dan Kompetensi Auditor dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/sosial-budaya/infografis/dampak-korupsi-terhadap-sosial-dan-kemiskinan>
- <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230113-kupas-tuntas-5-dampak-buruk-korupsi-terhadap-perekonomian-negara>
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/17406/Korupsi-Menghancurkan-Harapan-Kita-Bersama.html>



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

(MENCIPTAKAN MASA DEPAN TANPA KORUPSI)

BAB 3: TEORI DAN KONSEP ANTI KORUPSI

BAB 3

TEORI DAN KONSEP ANTI KORUPSI

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang pentingnya Kajian anti Korupsi

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan dengan pemaknaannya dengan politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum lainnya. Selain mengaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan Publik, kebijakan Internasional, kesejahteraan sosial dan pembangunan Nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan Korupsi hingga organisasi Internasional, seperti PBB memiliki badan khusus yang memantau Korupsi dunia. Dasar dan landasan untuk memberantas dan menanggulangi korupsi adalah memahami pengertian korupsi itu sendiri.

Korupsi merupakan persoalan multidimensi yang telah menjadi penyakit kronis dalam sistem pemerintahan, birokrasi, bahkan budaya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dampak dari praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, merusak kepercayaan publik, dan menciptakan ketidakadilan sistemik. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang holistik, bukan hanya dari sisi penegakan hukum, tetapi juga dari dimensi teori, konsep, dan pemahaman yang mendalam mengenai akar masalahnya. Oleh karena itu pembahasan korupsi di bab ini mengenai konsep dan teori-teori terjadinya korupsi dan teori dalam pencegahannya dalam berbagai pendekatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar metode penelitian hukum* (Edisi Revisi). RajaGrafindo Persada.
- Bologna, J. G., & Lindquist, R. J. (2006). *Audit investigatif: Mengungkap kecurangan keuangan* (S. M. Nur, Penerjemah). Erlangga.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement* (dikutip dalam Tuanakotta, T. M., 2013). *Audit berbasis ISA: Pendekatan terintegrasi* (Cet. ke-2). Salemba Empat.
- Ismail, S. (2019). *Korupsi: Konsep, teori, dan strategi pemberantasannya*. Pustaka Pelajar.
- Klitgaard, R. (2005). *Memberantas korupsi* (A. Syahriar, Penerjemah). Yayasan Obor Indonesia.
- Tuanakotta, T. M. (2013). *Audit berbasis ISA: Pendekatan terintegrasi* (Cet. ke-2). Salemba Empat.
- Zamroni, A., & Haris, S. (2020). *Korupsi di Indonesia: Teori dan realita*. LIPI Press.



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

(MENCIPTAKAN MASA DEPAN TANPA KORUPSI)

BAB 4: PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SEKOLAH DASAR

Dr. Yanti Amelia Lewerissa, S.H., M.H

Universitas Pattimura

BAB 4

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SEKOLAH DASAR

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya tindak pidana korupsi sangat mengkhawatirkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Memberantas korupsi di Indonesia bukan pekerjaan mudah dan perlu kerja berkelanjutan yang melibatkan semua pihak. Ada tiga strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutnya: Trisula Pemberantasan Korupsi. Layaknya trisula yang memiliki tiga ujung tajam, Trisula Pemberantasan Korupsi memiliki tiga strategi utama, yaitu Penindakan, Pencegahan, dan Pendidikan. Sula Penindakan menyasar peristiwa hukum yang secara aktual telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sesuai undang-undang. Sula ini tidak hanya mengganjar hukuman penjara dan denda bagi para pelaku korupsi, tapi juga memberikan efek jera bagi para korupsi dan masyarakat. Sementara Sula Pencegahan adalah perbaikan sistem untuk menutup celah-celah korupsi, dilengkapi oleh sosialisasi dan kampanye antikorupsi melalui Sula Pendidikan(aclc.kpk.go.id, 2022)

DAFTAR PUSTAKA

- aclc.kpk.go.id, Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi, 11 April 2022, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>, diakses tanggal 20 April 2024
- aclc.kpk.go.id, Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi, 11 Mei 2022, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220511-trisula-strategi-pemberantasan-korupsi-kpk-untuk-visi-indonesia-bebas-dari-korupsi>, diakses tanggal 20 April 2024
- Desiree, Modul Pendidikan Antikorupsi, Buku Panduan Guru SD/MI, Seri Pendidikan Anti Korupsi, KPK, Jakarta, 2008, Hal 4-9
- Florentinus Sudiran, Mencegah Korupsi Di Daerah Dengan Pengawasan Oleh Kejati, Jurnal LEGALITAS Volume 2 Nomor 1, Juni 2017, Hal 69
- Fajar, Arnie, Aplikasi S-T-M Pada Mata Pelajaran PPKn, Tesis PPs-UPI, Tidak diterbitkan, 2003
- Ijar Salna dkk, Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak Bangsa, AMI, Jurnal Pendidikan dan RiseVol. 1 – No. 1 Juni 2023, Hal 13-14
- Kemenag RI, Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Madrasah. Jakarta, 2013, Hal 10-12
- Kemendikbud RI Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan, Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas IV SD/MI (Berdasarkan Permendikbud No. 24/2016) Jakarta, 2017, Hal 7-9
- Lsp.kpk.go.id, Pendidikan Antikorupsi Adalah SSebuah Gerakan Budaya Menumbuhkan Nilai Antikorupsi Sejak Dini, 22 Juni 2028, <https://lsp.kpk.go.id/artikel-lsp/73>
- Ma'as Shobirin, Model Penanaman Nilai Antikorupsi Di Sekolah Dasar, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, [Vol 1, No 2, 2014](#), Hal 113-114
- Nestariana dan Ria, Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Sekolah Dasar Sanskara Pendidikan dan Pengajaran Vol. 01, No. 01, Januari, pp. 28-31

- Sakinah, Nuzus, and Nurhasanah Bakhtiar. "Model pendidikan anti korupsi di sekolah dasar dalam mewujudkan generasi yang bersih dan berintegritas sejak dini." *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education* 2.1, 2019, Hal 39-49
- W.J.S. Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hal 1230.
- Yanti Amelia Lewerissa, dkk, [Anti-Corruption Education For Sunday School Children As A Form Of A Non-Penal Policy To Eradicate Corruption](#), European Journal of Molecular & Clinical Medicine, Elsevier, Jilid 8 Tahun 2021, Hal 890-895
- Zainudin Hasan dkk, Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa, JALAKOTEK: *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol. 1 No. 2 Juli 2024, Hal 308-309



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

(MENCIPTAKAN MASA DEPAN TANPA KORUPSI)

BAB 5: PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

BAB 5

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

A. PENDAHULUAN

Korupsi, yang secara luas didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, masih menjadi penghambat besar pembangunan sosial-ekonomi. Pendidikan anti korupsi memberikan pemahaman tentang betapa merusaknya korupsi bagi pembangunan suatu negara. Korupsi tidak hanya menghambat perekonomian dan menciptakan ketidakadilan sosial, tetapi juga merusak sistem demokrasi, menciptakan kesenjangan sosial, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Laporan *Corruption Perceptions Index 2024* menempatkan Indonesia pada skor 37/100 (Transparency International, 2024). Problematika ini bukan monopoli birokrasi; sektor pendidikan tinggi ikut terdampak. Investigasi menunjukkan praktik penyuapan penerimaan mahasiswa, plagiarisme terstruktur, hingga *mark-up* proyek infrastruktur kampus, terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia (Transparency International, 2013). Ironis, karena perguruan tinggi diidealkan sebagai penjaga rasionalitas ilmiah sekaligus laboratorium karakter.

Pendidikan Anti-Korupsi (PAK) di kampus dipandang strategis secara preventif dan transformatif. Preventif, karena mahasiswa yang sebentar lagi memasuki dunia profesional, perlu “imunisasi nilai” agar perilaku koruptif tidak mengakar (Al-Sabah, et al., 2025). Transformatif, karena internalisasi integritas menjadikan mereka *agents of change* yang berani menolak praktik tidak etis. Teori pembelajaran moral Kohlberg menegaskan bahwa perkembangan penalaran etis sangat dipengaruhi pengalaman konkret dan diskursus reflektif (Kohlberg, 1984). Kampus, dengan kultur diskusi dan praktik kolektif merupakan medium ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sabah, A., Al-Jabri, S. & Al-Sabih, S., 2025. Impact of Anti-Corruption Education Program on Students' Attitudes and Behavior. *International Journal of Educational Narratives*, 3(1), pp. 113-122.
- Anderson, L. W. et al., 2001. *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. s.l.:Addison Wesley Longman, Inc..
- Antari, L. P. S., 2022. Peran Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(1), pp. 70-84.
- Becker, G. S., 1974. Crime and Punishment: An Economic Approach. In: *Essays in the Economics of Crime and Punishment*. s.l.:NBER, pp. 1-54.
- Berkowitz, M. & Bier, M., 2004. What Works in Character Education?. *Character Education Partnership*.
- Biggs, J. & Tang, C., 2011. *Teaching for Quality Learning at University*. 4th ed. New York: McGraw-Hill.
- Brătianu, C., Reinhardt, Z. & Almășan, O., 2010. Practice Models and Public Policies in the Management and Governance of Higher Education. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, Volume 29E, pp. 39-50.
- Brennan, R. & Ahmad, S. J., 2005. Using case studies in management education; the student perspective. *International Journal of Management Education*, pp. 21-30.
- Chen, X. X. & Slade, E., 2024. *Theory of Planned Behaviour: A review*. s.l.:s.n.
- Cornish, D. B. & Clarke, R. V., 2017. *The reasoning criminal : rational choice perspectives on offending*. London: Routledge.
- Cressey, D. R., 1971. *Other People's Money; a Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Calif: Wadsworth Pub. Co.
- Darling-Hammond, L. & Adamson, F., 2010. *Beyond Basic Skills: The Role of Performance Assessment in Achieving 21st Century Standards of Learning*. Stanford: Stanford University.

- Hämäläinen, K. et al., 2003. *A University Benchmarking Handbook Benchmarking in European Higher Education*. Helsinki: European Network for Quality Assurance in Higher Education.
- Hermanson, D. R. & Wolfe, D. T., 2024. *The Fraud Diamond: A 20-Year Retrospective*. [Online]
Available at: <https://www.cpajournal.com/2024/06/10/the-fraud-diamond/>
[Accessed 24 04 2025].
- Hmelo-Silver, C. E., 2004. Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn?. *Educational Psychology Review*, 16(3), pp. 235-266.
- Kapp, K. M., Blair, L. & Mesch, R., 2014. *The Gamification of Learning and Instruction Fieldbook: Ideas into Practice*. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc..
- Kennedy, D., Hyland, Á. & Ryan, N., 2007. Writing and Using Learning Outcomes: a Practical Guide. In: *Implementing Bologna in your institution*. s.l.:s.n.
- Kirkpatrick, J. D. & Kirkpatrick, W. K., 2016. *Kirkpatrick's four levels of training evaluation*. Alexandria: ATD Press.
- Kohlberg, L., 1984. *The psychology of moral development : the nature and validity of moral stages*. San Francisco: Harper & Row.
- Kyambade, M., 2023. The Role of Case Studies in Teaching Business Ethics: A Literature Review. *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, 5(4).
- Lickona, T., 1992. *Educating for Character : How Our Schools can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam.
- Menristekdikti, 2019. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. s.l.:Menter! Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia,.
- Messallam, A. A., 2016. Individual and Contextual Influences on Academic Dishonesty: an Investigation of Under- graduate Student Perceptions. *JRL of the Faculty of Commerce for Scientific Research*, 53(2).
- Moon, J. A., 2004. *A Handbook of Reflective and Experiential Learning: Theory and Practice*. London: RoutledgeFalmer.

- Nadir, 2024. The Urgency of Anti-Corruption Education Course in Universities as a Long-Term Approach Model to Preventing Corrupt Behavior and Criminal Acts of Corruption. *Journal of Education Research*, 5(1), pp. 795-806.
- Piaget, J., 1932. *The Moral Judgment of the Child*. Illinois: The Free Press.
- Presiden Republik Indonesia, 2001. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. s.l.:Presiden Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia, 2019. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. s.l.:Presiden Republik Indonesia.
- Putri, N. A., Handoyo, E., Martitah, M. & Mustofa, M. S., 2023. *Penguatan Literasi Pendidikan Anti Korupsi berbasis Kearifan Lokal dalam Pembelajaran IPS*. s.l., Universitas Negeri Semarang, pp. 561-569.
- Riva, G., 2022. 0.06 - Virtual Reality in Clinical Psychology. *Comprehensive Clinical Psychology (Second Edition)*, Volume 10, pp. 91-105.
- Sterling, S., 2004. Higher Education, Sustainability and the Role of Systemic Learning. In: *Higher Education and the Challenge of Sustainability: Contestation, Critique, Practice, and Promise*. s.l.:Kluwer Academic.
- Suwarto, R. S., 2021. *Implementasi Education for Sustainable Development dan Pencapaian Sustainability Consciousness Siswa di Sekolah Adiwiyata dan sekolah Berbasis ESD*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Transparency International, 2013. *Global Corruption Report: Education*. New York: Routledge.
- Transparency International, 2014. *Asia Pacific Youth: Integrity in Crisis*. s.l.:Transparency International.
- Transparency International, 2024. *Corruption Perceptions Index*. [Online] Available at: <https://www.transparency.org/en/cpi/2024> [Accessed 24 04 2025].

UNODC, n.d. *Learn about UNCAC*. [Online]

Available at: <https://www.unodc.org/corruption/en/uncac/learn-about-uncac.html>

[Accessed 24 04 2025].

Wiggins, G. P., 1998. *Educative assessment : designing assessments to inform and improve student performance*. San Francisco: Jossey-Bass.



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

(MENCIPTAKAN MASA DEPAN TANPA KORUPSI)

BAB 6: PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI LUAR SEKOLAH

M Zainul Hafizi, M.Pd

Universitas Tanjungpura, Pontianak

BAB 6

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI LUAR SEKOLAH

A. PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, bahkan dunia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga mengikis nilai-nilai moral, kepercayaan publik, dan tatanan sosial. Dalam konteks ini, pendidikan anti korupsi menjadi kebutuhan yang mendesak, bukan hanya sebagai alat untuk memberantas korupsi, tetapi juga untuk membangun budaya integritas yang kokoh. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya bergantung pada penegakan hukum; melainkan harus dimulai dari pembentukan karakter, terutama sejak usia dini, melalui pendidikan yang menyentuh semua lapisan masyarakat.

Namun, pendidikan anti korupsi sering kali terfokus di ruang-ruang kelas formal. Padahal, nilai-nilai anti korupsi tidak hanya dapat, tetapi juga harus diajarkan di luar sekolah. Lingkungan keluarga, komunitas masyarakat, hingga media sosial memiliki peran strategis dalam memperluas cakupan pendidikan ini. Di sinilah pendekatan pendidikan anti korupsi di luar sekolah dapat menjadi salah satu solusi inovatif untuk membangun budaya antikorupsi secara lebih menyeluruh dan efektif. Melalui cara ini, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dapat ditanamkan secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai gambaran, data dari *Transparency International* menunjukkan bahwa Indonesia memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) sebesar 34 pada tahun 2023, yang masih jauh dari ideal. Ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan penguatan pada semua lini, termasuk melalui pendidikan. Sementara itu, survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang bahaya korupsi masih terbatas, terutama di kalangan anak muda. Kondisi ini menjadi dasar pentingnya memperluas pendekatan

DAFTAR PUSTAKA

- Chaerudin, Dinar, S. A., & Fadillah, S. (2021). *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama.
- Fauzantto, A. (n.d.). *Wajah Korupsi di Indonesia (Himpunan Artikel Ilmiah-Populer Terangkai)*. Widina Media Utama .
- Gultom, M. (2018). *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. PT. Refika Aditama.
- Kristian. (2015). *Tindak Pidana Korupsi, Kajian Terhadap Harmonisasi*. Refika Aditama.
- Musanna, M. (2017). *Peran sekolah dalam pembentukan karakter dan nilai sosial*. Jakarta: Pustaka Pendidikan.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Survei pemahaman masyarakat tentang bahaya korupsi. <https://kpk.go.id/id/publikasi-data/kajian/survei-kesadaran-dan-pemahaman-terhadap-korupsi> diakses pada 28 Februari 2025
- Transparency International. (2023). Corruption perceptions index 2023. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023> diakses pada 20 Februari 2025
- Rosikah, Chatrina Darul; Listianingsih, Dessy Marliani. 2019. *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi, Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansar, A., Yoga Utama Panggabean, R. S., Sutrisman, N., & Rambe, G. (2023). *Buku ajar pengantar pendidikan anti korupsi (Cetakan pertama)*. Medan: UMSU PRESS



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

(MENCIPTAKAN MASA DEPAN TANPA KORUPSI)

BAB 7: KEBIJAKAN DAN REGULASI ANTI KORUPSI

Achmad Surya, S.H., M.H.Li

Universitas Gajah Putih

BAB 7

KEBIJAKAN DAN REGULASI ANTI KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga menimbulkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Korupsi juga telah menjadi *extra ordinary crimes* yang telah nyata menggerogoti dan membahayakan keuangan dan perekonomian negara Indonesia dan menghambat pembangunan Nasional. Korupsi Sebagai salah satu jenis kejahatan, korupsi memiliki karakteristik sendiri dibandingkan kejahatan jenis lainnya. Pelaku biasanya memiliki kekuasaan, baik itu politik, ekonomi, birokrasi, hukum maupun kekuasaan lain (Kristiana, 2018). Korupsi dengan berbagai bentuknya tersebut telah dan akan berdampak yang sangat besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Berbagai dampak tersebut adalah dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan, dampak birokrasi pemerintahan, dampak politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap Hankam, dan dampak kerusakan lingkungan (Sumaryati, dkk. 2019). Penulis pada pembahasan materi akan menjelaskan secara singkat pengertian kebijakan anti korupsi, tujuan kebijakan anti korupsi, dan regulasi anti korupsi.

B. PENGERTIAN KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Kebijakan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*policy*" secara etimologis atau asal katanya jika ditinjau dari perspektif historis dapat dilihat dari pendapat Ira Sharkansky yang menyatakan bahwa kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan bahasa Latin (Dunn, 2003). Asal usul etimologis kata "*policy*" sama dengan dua kata penting lainnya yaitu "*police*" dan "*politics*". Inilah salah satu alasan mengapa banyak bahasa modern, misalnya bahasa Jerman dan bahasa Rusia hanya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Waluyo, B. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiharjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Dunn, W.N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2015). *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: RadjaGrafindo.
- Handoyo, E. (2013). *Pendidikan Antikorupsi*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Jhones, C.O. (1994). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Grafindo.
- Johnson, M. (2005). *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Maheka, A. (2013). *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kristiana, Y. (2018). *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Mayer, R.R. dan Greenwood, E. (1984). *Rancangan penelitian kebijakan sosial diterjemahkan oleh Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana, disunting oleh Yusufhadi Miarso*, Rajawali, Jakarta.
- Pratiwi, A. dkk. (2020). *Strategi Pemberantasan Korupsi : Buku Pendidikan Anti Korupsi*. Magelang: Pustaka Rumah C1nta.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Salahudin, A. (2018). *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Solikin, N dan Nurul Anam. (2015). *Pendidikan Anti Korupsi : Konsep dan Aplikasi Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, dan Perguruan Tinggi*, Jember: IAIN Jember Press.
- Sunggondo, B. (1994). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumaryati, dkk. (2019). *Pendidikan Antikorupsi Dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, Yogyakarta : UAD Press.

Jurnal/Artikel Ilmiah

Serbabagus, S. 'Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Pada Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi', *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 1, No. 1, Juli 2017, <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.239>.

Kamus

Tim Penyusun, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

(MENCIPTAKAN MASA DEPAN TANPA KORUPSI)

BAB 8: PERAN GURU DAN TENAGA PENDIDIK

Ujang Enas, M.Si.

Universitas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya

BAB 8

PERAN GURU DAN TENAGA PENDIDIK

A. PENDAHULUAN

Pendidikan anti korupsi menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam upaya membangun masyarakat yang adil, transparan, dan berintegritas. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat merusak fondasi demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi, dan mengancam keadilan sosial. Untuk mengatasi masalah korupsi ini, diperlukan upaya yang sistematis dan komprehensif, disinilah pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam upaya untuk menghilangkan atau menghapus perbuatan korupsi.

Dalam konteks pendidikan, peran guru dan tenaga pendidik menjadi kunci dalam menyampaikan nilai-nilai anti korupsi kepada generasi muda. Mereka bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang membentuk karakter dan sikap siswa terhadap korupsi. Melalui kurikulum yang relevan, pembelajaran yang berbasis nilai, dan pengalaman praktis, guru dan tenaga pendidik dapat membantu siswa memahami dampak negatif korupsi serta pentingnya integritas dan kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kurikulum pendidikan anti korupsi telah diakui secara internasional sebagai instrumen penting dalam membentuk sikap dan perilaku untuk menghindari korupsi sejak dini. Dalam hal ini, peran guru dan tenaga pendidik tidak hanya terbatas pada menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga dalam membangun kesadaran, mengembangkan keterampilan kritis, dan mendorong tindakan nyata untuk melawan korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guru dan tenaga pendidik memiliki keunggulan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memfasilitasi diskusi terbuka tentang isu korupsi. Dengan menciptakan suasana akademik yang inklusif dan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif, guru dan tenaga pendidik

DAFTAR PUSTAKA

- Bhargava, V., & Gupta, A., 2005. *Corruption and the Education Sector in India*. Paris : UNESCO.
- Ennis, R.H., 1996. *Critical Thinking*. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall.
- Facione, P. A., 2011. *Critical Thinking : What It Is and Why It Counts*. Insight Assessment.
- Freire, P., 1970. *Pedagogy of the Oppressed*. New York : Herder and Herder.
- Hallak, J., & Poisson, M., 2007. *Corrupt schools, corrupt universities: What can be done?*. Paris : International Institute for Educational Planning.
- Haryatmoko, 2016. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Heinich, R., Molenda, M., Russell, J.D., & Smaldino, S.E., 2002. *Instructional Media and Technologies for Learning* (7th ed.). New Jersey : Merrill Prentice Hall.
- Klitgaard, R., 1988. *Controlling Corruption*. University of California Press.
- Kohlberg, L., 1981. *The Philosophy of Moral Development*. San Francisco : Harper & Row.
- lack, P., & Wiliam, D., 1998. *Assessment and Classroom Learning*. *Assessment in Education : Principles, Policy & Practice*, 5(1), 7–74.
- Sadler, D. R., 1989. *Formative Assessment and the Design of Instructional Systems*. *Instructional Science*, 18(2), 119–144.
- Sani, R. A., 2014. *Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi Kurikulum 2013*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sudrajat, A. ,2011. *Mengembangkan Karakter melalui Pembelajaran Kontekstual*. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1), 45–58.
- Suryadi, A., 2015. *Pendidikan Antikorupsi Berbasis Sumber Belajar Kontekstual*. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 5(2), 134–144.
- Suyatno, & Setiawan, A., 2020. *Peran Guru dalam Membentuk Karakter Antikorupsi Siswa*. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 185–197.
- Tilaar, H.A.R., 2002. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Jakarta : LP3ES.

Wahyuni, S., 2018. *Meningkatkan Kesadaran Antikorupsi Melalui Kegiatan Edukasi di Sekolah*. Jurnal Pendidikan Karakter, 9(1), 87–96.

Sumber Lain :

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2020. *Pendidikan Antikorupsi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta : KPK.

UNESCO, 2008. *Corruption in education: A major challenge for sustainable development*. Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000169337>

Transparency International, 2013. *Education against corruption: A manual for educators*. Retrieved from [https://www.transparency.org/whatwedo/publication/education_a gainst_corruption_a_manual_for_educators](https://www.transparency.org/whatwedo/publication/education_against_corruption_a_manual_for_educators)

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)., 2013. *Education for Justice : Handbook on Anti-Corruption Education for Youth*. Retrieved from https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/13-85025_E4J_Handbook_AntiCorruption_Education.pdf

World Bank., 2007. *Curbing Corruption in Public Procurement : A Practical Guide*. Retrieved from <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6849>



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

(MENCIPTAKAN MASA DEPAN TANPA KORUPSI)

BAB 9: PERANAN INTERNASIONAL DALAM PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

BAB 9

PERANAN INTERNASIONAL DALAM PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang demi keuntungan pribadi (UNESCO, 2019). Fenomena ini telah diakui secara luas sebagai salah satu tantangan utama yang menghambat stabilitas politik, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan merusak tatanan sosial-budaya di berbagai negara. Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan—salah satunya melalui pendidikan anti-korupsi.

Pendidikan anti-korupsi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk korupsi, tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai integritas serta membentuk karakter yang berkomitmen pada kejujuran dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini penting untuk ditanamkan sejak dini agar tercipta budaya antikorupsi yang kuat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks global, peran aktor internasional menjadi sangat krusial. Melalui kerja sama lintas negara, baik yang bersifat formal maupun informal, terbuka ruang untuk saling bertukar informasi, pengalaman, dan sumber daya yang mendukung penguatan sistem pendidikan. Dukungan internasional terhadap pendidikan anti-korupsi dapat berupa kebijakan kolektif, program pelatihan lintas negara, serta pengembangan kurikulum baik di jalur pendidikan formal maupun non-formal.

Sejumlah organisasi dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Transparency International*, dan Bank Dunia telah memainkan peran penting dalam membentuk kerangka kerja dan strategi pedagogis yang dapat diterapkan secara global, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik lokal masing-masing negara. Sebagai contoh, *Transparency*

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Dunia. (2013). *Building effective anti-corruption education: A global perspective*. The World Bank Group.
- International Monetary Fund. (2019). *The role of international diplomacy in anti-corruption education*. International Monetary Fund.
- Pusat Pendidikan PBB. (2011). *Pendidikan anti-korupsi: Konsep dan implementasi di berbagai negara*. United Nations Development Programme.
- Transparency International. (2013). *Promoting transparency and integrity: Global efforts against corruption*. Transparency International.
- World Economic Forum. (2022). *Global education and anti-corruption strategies: Learning from best practices*. World Economic Forum.



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

(MENCIPTAKAN MASA DEPAN TANPA KORUPSI)

BAB 10: MENGEMBANGKAN BUDAYA INTEGRITAS DI DALAM LINGKUNGAN PENDIDIKAN

BAB 10

MENGEMBANGKAN BUDAYA INTEGRITAS DI DALAM LINGKUNGAN PENDIDIKAN

A. PENDAHULUAN

Berita mengenai korupsi yang mewarnai media massa nasional umumnya menciptakan kemarahan dan kegeraman pada sebagian masyarakat Indonesia. Salah satu kasus korupsi yang terbaru adalah kasus pengelolaan gaji petugas kebersihan yang dilakukan oleh Kepala Dinas dan Bendahara Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara, Sumatera Utara sejumlah Rp 665 juta (Siregar, 2025).

Tidak cukup hanya itu, masyarakat juga membaca mengenai dugaan korupsi pengadaan laptop *Chromebook* yang dikaitkan dengan kebijakan Menteri Kebudayaan Nadiem Makarim pada masa kepemimpinannya (Ristiyanti, 2025), dan dugaan korupsi korupsi importasi gula kristal mentah (GKM) pada Oktober 2023 yang dituduhkan kepada Tom Lembong (Ni'am & Carina, 2025). Sejumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa pelakunya melibatkan unsur pejabat pemerintah, yang kasus-kasusnya terentang dari kasus yang dinilai murni pidana kasus korupsi, hingga kasus yang dinilai bernuansa politis.

Sejumlah kasus tersebut menjadi titik awal untuk menunjukkan bagaimana problema korupsi bukan merupakan hal yang sulit ditemukan dalam media massa dan bahkan dalam dunia pendidikan di sekolah seperti terjadi di Depok, Jawa Barat. Disebutkan bahwa terjadi manipulasi nilai rapor pada 51 murid sepanjang lima semester yang terjadi di SMP Negeri 19 Depok (Ramadhanty & Farisa, 2024; Ayu & Juliansyah, 2024). Yang menarik dari kasus ini adalah tidak diperoleh informasi mengenai kelanjutan dari kasus tersebut.

Data yang disebutkan terkait dengan pengadaan laptop dan manipulasi nilai menunjukkan bahwa praktik terkait dengan isu korupsi merupakan isu yang melekat pada institusi pendidikan. Dalam konteks ini penting menggarisbawahi integritas terkait dengan korupsi menjadi krusial

DAFTAR PUSTAKA

- ACLS KPK, 2024. “Mirisnya Praktik Korupsi Sektor Pendidikan”, dalam Pusat Edukasi Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240610-mirisnya-praktik-korupsi-sektor-pendidikan>
- Ayu, RD & Juliansyah, R. 2024. “Kronologi Skandal Manipulasi Nilai Rapor di Depok Terungkap” *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-skandal-manipulasi-nilai-rapor-di-depok-terungkap-39170>
- Audi, Robert, dan Murphy. P., 2006. “The Many Faces of Integrity.” *Business Ethics Quarterly* 16(1): 3-21.
- BBC, 2025. “Ribuan siswa keracunan Makan Bergizi Gratis, orang tua trauma dan larang anaknya konsumsi MBG – 'Bukannya meringankan malah mau membunuh'”. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm2zney05ypo>
- Curran, J. 2011. *Media and democracy*. New York: Routledge
- Chu, B., Horton, J., Epstein, K., & Silva, M., 2025. “Banjir di Texas tewaskan lebih dari 100 orang, ada kaitannya dengan efisiensi anggaran pemerintahan Trump?” *BBC.com* <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c628nedgk9o>
- Cobos-Urbina, E. (2021). “Social Media: useful for high-risk industries? A study of nuclear energy in Spain”. *Communication & Society*, 34(1), 143–154. <https://doi.org/10.15581/003.34.1.143-154>
- Huberts L. W. J. C., 2018. “Integrity: What it is and Why it is Important” dalam *Public Integrity*, 20: S18–S32, American Society for Public Administration ISSN: 1099-9922 print/1558-0989 online DOI: 10.1080/10999922.2018.1477404
- Indonesia Corruption Watch, 2024. “Refleksi Hari Pendidikan Nasional: Korupsi Sektor Pendidikan Masih Tinggi”, <https://antikorupsi.org/id/refleksi-hari-pendidikan-nasional-korupsi-sektor-pendidikan-masih-tinggi>

- Mawalia, KA. Ed., 2025. Pakar UNAIR Soroti Kasus Keracunan pada Program Makan Bergizi Gratis. <https://unair.ac.id/pakar-unair-soroti-kasus-keracunan-pada-program-makan-bergizi-gratis/>
- Nadine Gatzert, 2015. "The impact of corporate reputation and reputation damaging events on financial performance: Empirical evidence from the literature", *European Management Journal* 33 (2015) 485e499 <http://dx.doi.org/10.1016/j.emj.2015.10.001>
- Ni'am, S. & Carina, J. 2025. "Kronologi Kasus Tom Lembong: Disidik Menjelang Pilpres, Dibebaskan Prabowo", *kompas.com* <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/08130231/kronologi-kasus-tom-lembong-disidik-menjelang-pilpres-dibebaskan-prabowo?page=all>.
- Pianalto, M. 2012. 'Integrity and Struggle,' *Philosophia*, Volume 40. Pp. 319–336.
- Pindo, JC; Puspitasari; Simanjuntak, R.; Tambunan, R.; Sumampauw, J., Huliselan, B., Patty, A.; & Hutabarat, RMP. 2018. *Gereja melawan korupsi*. Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia
- Priyono, B. Herry, 2025. *Korupsi: melacak arti, menyimak implikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ristiyanti, J. 2025. "Usai Geledah GoTo, Kejagung Periksa Nadiem Makarim Hari Ini" *Tempo.co* <https://www.tempo.co/hukum/usai-geledah-goto-kejagung-periksa-nadiem-makarim-hari-ini-2004864>
- Siregar, Z. 2025. "Korupsi Gaji Petugas Kebersihan, Kadis dan Bendahara Perkim LH Batubara Ditahan Jaksa" *MedanBisnisDaily.com* https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2025/08/02/191587/korupsi_gaji_petugas_kebersihan_kadis_dan_bendahara_perkim_lh_batubara_ditahan_jaksa/
- SEOP, 2021. "Integrity". *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://seop.illc.uva.nl/entries/integrity/>
- Susanti, L. 2025. "KCD Setuju Siswa SMKN 1 Kota Bogor yang Bercanda soal MBG Minta Maaf," dalam *IDN Times*, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/kcd-setuju-siswa-smkn-1-kota-bogor-yang-bercanda-soal-mbg-minta-maaf-00-sk545-szp1zd>
- Ramadhanty, DA & Farisa, FC., 2024. "12 Guru SMPN 19 Depok Disebut Manipulasi Nilai Rapor 51 Murid pada Lima Semester",

Kompas.com <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/08/08/05463571/12-guru-smpn-19-depok-disebut-manipulasi-nilai-rapor-51-murid-pada-lima>.

- Toruan, RCL., 2025. "Kasus-kasus Keracunan MBG Sejak Januari 2025" Tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/kasus-kasus-keracunan-mbg-sejak-januari-2025--1433916>
- Yu, C., Chen, CM., Juang, WJ., Hu, LT. 2008. "Does democracy breed integrity? Corruption in Taiwan during the democratic transformation period. *Crime Law Social Change*, Volume 49. pp. 167– 184 <https://doi.org/10.1007/s10611-007-9093-1>



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

(MENCIPTAKAN MASA DEPAN TANPA KORUPSI)

BAB 11: EVALUASI DAN MONITORING PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Zulkarnain Hamson, S.Sos., M.Si.

Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar

BAB 11

EVALUASI DAN MONITORING

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Pendidikan Anti Korupsi (PAK) bukan hanya soal memberikan pengetahuan kepada siswa atau mahasiswa, tetapi juga membangun mentalitas dan karakter kuat bagi generasi bangsa, dalam buku “Membedah Anatomi Korupsi” telah penulis paparkan fenomena korupsi di sejumlah negara, menyuguhkan rangkaian penelitian tentang tindak korupsi di Asia, Afrika, Eropa, Australia, dan Amerika (Z Hamson dan Makkah. HM, 2021). Indonesia masuk kategori negara dengan tingkat kerawanan korupsi tertinggi di dunia (“Sejarah Panjang Korupsi Di Indonesia Dan Upaya Pemberantasannya,” 2015). Dengan menanamkan nilai-nilai secara konsisten, kita dapat menciptakan masyarakat berkualitas, tidak hanya memahami pentingnya integritas, tetapi juga memiliki komitmen untuk mewujudkannya dalam setiap aspek kehidupan (Supriyanta, 2009). Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan nilai-nilai moral, sosial, dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi menjadi salah satu langkah strategis untuk mencegah dan memberantas perilaku koruptif (Rifai, 2018).

a. Latar Belakang

Pentingnya mempelajari Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dikarenakan membantu bangsa dan negara dalam menyiapkan generasi berkualitas, untuk memimpin bangsa dan negara, mengendalikan roda pemerintahan melalui: **a) Memperkuat Kesadaran tentang Nilai-Nilai Kejujuran:** Pendidikan anti-korupsi bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sejak usia dini. Dengan memahami

DAFTAR PUSTAKA

- Berti Suman, A., & van Geenhuizen, M. (2020). Not just noise monitoring: rethinking citizen sensing for risk-related problem-solving. *Journal of Environmental Planning and Management*, 63(3), 546–567. <https://doi.org/10.1080/09640568.2019.1598852>
- Handoyo, E. (2013). *Pendidikan Anti Korupsi (Edisi Revisi)*. 256. www.penerbitombak.com
- Ketut, N., Fitri, D., & Dewi, Y. (2023). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis P-ISSN*, 3(1), 26–32.
- N, M. K. (2017). METODE EVALUASI SPECIAL EVENT. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1). <https://doi.org/10.21009/communicology.051.02>
- Rifai, R. (2018). Mengajarkan Sikap Anti Korupsi Sejak Dini Melalui Refleksi Keluaran 23:1-13. *Kurios*. <https://doi.org/10.30995/kur.v4i1.30>
- Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya. (2015). *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 12(2). <https://doi.org/10.22146/jkap.8404>
- Sumaryati, Suyadi, & Hastuti, D. (2019). *Pendidikan Antikorupsi Dalam Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat*.
- Supriyanta. (2009). Pendidikan Anti Korupsi Di Indonesia. *Pendidikan Anti Korupsi*.
- Z Hamson dan Makkah. HM. (2021). *Membedah Anatomi Korupsi* (Moh. Nasrudin (Ed.); 1st ed.). PT. Nasya Expanding Management. https://www.researchgate.net/publication/364224456_Membedah_Anatomi_Korupsi
- Zulkarnain Hamson dan Nani Harlinda Nurdin. (2019). Pelatihan Metodologi Mengajar Guna Peningkatan Kompetensi Instruktur AISI Kota Makassar. [Http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/JCES/Article/View/1480](http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/JCES/Article/View/1480), 2(2), 11–17. <https://doi.org/10.31764/jces.v2i2.1480>



PROFIL PENULIS

Apriani Riyanti, S.Pd., M.Pd



Penulis lahir di Jakarta pada tanggal 24 April, bertempat tinggal di Cawang-Kramat jati Jakarta Timur, pernah mengenyam pendidikan di SDN 08 Cawang, SMPN 50 Kramat Jati Jakarta, SMAN 42 Halim Jakarta, S1 dan S2 Penulis jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, almamter Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Penulis pernah mengajar di SMP IF Assalafy Kebon Nanas Jakarta, di SMA Islam PB Soedirman, MAN 2 Jakarta, MAN 14 Pondok Ranggon Jakarta. Penulis merupakan anak ke 9 dari 9 bersaudara, anak dari Alm. Bapak Salman Sastodihardjo dan Ibu Ngadisah, Penulis dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Binawan, PKN STAN dan Universitas Terbuka, kesibukan selain mengajar beliau penulis beberapa artikel, kumpulan puisi, karena sangat suka menulis, selain kewajiban inti seorang dosen menunaikan Tri Darma, melakukan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Apriani Riyanti memiliki hobby membaca, menulis, dan berkebun, saat ini beliau mengabdikan sebagai dosen tetap di Universitas Binawan Jakarta, serta dosen tamu di Sekolah Ikatan Dinas PKNSTAN, Bintaro, Tangerang Selatan, dan tutor di Universitas Terbuka, Jakarta.

Ilham Ramadhan Eryafdi



Penulis merupakan lulusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada tahun 2012 dan S2 Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Trisakti (USAKTI) pada tahun 2016. Ketertarikan penulis di bidang akuntansi dimulai sejak SMA saat penulis menjadi perwakilan sekolah untuk mengikuti Pra Olimpiade Sains Mata Pelajaran Ekonomi se-Kota Medan tahun 2007 dan meraih peringkat lima serta menjadi perwakilan di tingkat Nasional. Penulis telah bekerja di bidang akuntansi sejak tahun 2011 dan saat ini bekerja sebagai Budgeting & Business Analyst di PT Adaro Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. Selain itu, penulis juga tercatat sebagai

dosen tetap di program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) sejak tahun 2017.

Murni Parembai, SS.M.Ag



Penulis dilahirkan di Sidrap, 05 April 1974. Menyelesaikan Pendidikan S1, Fakultas Sastra Jurusan Asia Barat (1997) Kuliah rangkap Fakultas Agama Jurusan Tafsir Hadits di Universitas Muslim Indonesia Makassar Sulawesi Selatan. Tahun 1997-2000 melanjutkan S2 di Jurusan Magister Pengkajian Islam dengan Predikat Cumlaude. Tahun 2004 - sekarang penulis berkarir dan menetap di Jakarta. Sebagai Dosen tetap di Universitas Mohammad Husni Thamrin mengajar Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Fakultas Kesehatan Universitas Mohammad Husni Thamrin, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Mata Kuliah Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi Universitas MH.Thamrin. Penulis aktif di Organisasi ADPK Assosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan SeJabodetabek. 2014 mengikuti Training of trainer bagi Dosen ADPK di LEMHANAS. Selain itu penulis juga mengajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Kedinasan Politeknis STIS Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Otista Cawang Jakarta.

Dr. Yanti Amelia Lewerissa, SH., MH



Penulis adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon. Penulis lahir di Ambon pada tanggal 26 April 1981. Penulis menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon (lulus Tahun 2004), S2 pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang (lulus Tahun 2009) dan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar (lulus Tahun 2021). Sejumlah penelitian yang pernah penulis publish ke jurnal nasional maupun internasional antara lain : Criminal Policy of Hate Speech in Social Media Against The Religious Dignity of Society in The Digital Century, *ASSEHR Vol 187, Atlantis Press, 2018*, Destructive Fishing Criminal Policy in Fisheries Management Area 715 Seram Sea (*Dialogos*

Journal Vol 25 No 2 Tahun 2021), Kebijakan Kriminal Perburuan Burung Wallacea di Kepulauan Aru (*Jurnal Sasi Vol 27 No 3 Tahun 2021*), Criminal Policy of The Exploitation of Flying Fish Eggs in Southeast Maluku Waters (*Jurnal Belo Vol 8 No 1 Tahun 2022*), Criminal Policy Corruptiom Natural Resources in The Fisheries Sector, Jurnal Sasi Vol 29 No 1 Tahun 2023, Social Media and Violence Against Women in Terms of Human Rights Perspective, OSF Preprints, 2023, Manfaat pemindanaan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Tatohi, Vol 2 No 12 tahun 2023, Factors Causing Destructive Fsihing in The Waters of The West Seram Sea (*International Journal of Science and Society* 6 (1), 2024, 532-538), [Ideal Government Policy In Fulfilling The Social and Cultural Economic Rights of Sangir Philippine Citizens](#) (SASI 30 (3), 2024, 249-257), Kemanfaatan Hukum Melalui Mediasi (Buku Referensi, Penerbit Eurekia Media Aksara, 17 Februari 2024).

Supiati, S.TP., MPH



Penulis lahir di Luwu, pada 05 Nopember 1965. Menempuh pendidikan, SD, SMP dan SMA di Kab. Kolaka. Mengawali karier dibidang kesehatan sejak SPAG (Sekolah Pembantu Ahli Gizi) tahun 1986. Melanjutkan Pendidikan ke jenjang strata 1 di Fakultas Teknologi Pertanian Univ. Sulawesi Tenggara Pada tahun 2006 dan S2 Pada Program Studi Gizi dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada tahun 2012, kini bekerja sebagai Dosen tetap di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari. Mata Kuliah yang diampu; Pendidikan Budaya Anti Korupsi, Ilmu pangan, K3 *patient safety* Laboratorium dan Instrumentasi. Bisnis dan kewirausahaan

M, Zainul Hafizi, M.Pd



Penulis lahir di Dusun Mosok, Desa Surabaya, Kecamatan Sakrat Timur, Lombok Timur, NTB, pada 3 Mei 1990, penulis menempuh pendidikan di MI NW Surabaya (1997-2003), MTs NW Surabaya (2003-2006), dan MA Muallimin NW Gunung Rajak (2006-2009). Meraih gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta (2016) dan Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari universitas yang sama (2019). Saat ini, saya berprofesi sebagai ASN-Dosen pada Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Achmad Surya, S.H., M.H.Li



Penulis lahir di Medan pada Tanggal 6 April 1985. Penulis menempuh sarjana strata (S1) Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, kemudian melanjutkan studi (S2) Magister Hukum Litigasi di Universitas Gadjah Mada. Penulis merupakan staf pengajar/dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih, selain itu juga aktif mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon (STIHMAT) dan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta telah menerbitkan beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan di beberapa jurnal ilmiah nasional dan jurnal nasional terakreditasi.

Ujang Enas, M.Si



Penulis lahir di Kota Tasikmalaya tepatnya pada tanggal 6 Desember 1977, merupakan anak sulung dari lima bersaudara. Setelah tamat dari SDN Tugu III Tasikmalaya tahun 1990, melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sambong Jaya Tasikmalaya dan tamat tahun 1990, lalu melanjutkan ke SMAN 2 Tasikmalaya (Jurusan Fisika-A₁) dan tamat tahun 1996. Pendidikan S1 Administrasi Publik di tempuh di STIA YPPT Tasikmalaya dan tamat tahun 2006, pendidikan S2 Administrasi Publik pada sekolah yang

sama, menjadi lulusan terbaik angkatan XIX dan lulus pada tahun 2018. Saat ini bekerja sebagai Dosen di Universitas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya, selain sebagai pengajar, penulis juga menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Pusat Karier (tahun 2022 – 2024), sebelumnya sebagai Kepala Bagian Kemahasiswaan (tahun 2019 – 2022) dan menjadi Auditor Internal Kampus STIKes BTH (tahun 2018), sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Manusia tahun 2017 s.d. 2019, Ketua Unit Pelaksana Teknis BTH Student House (UPT BSH) tahun 2016 s/d 2017, dan Kepala Bagian Sarana Prasarana tahun 2014 s.d. 2016. Selain mengajar di kampus sendiri, penulis pernah mengajar di STIKes Muhammadiyah Ciamis sebagai Dosen Luar Biasa dari tahun 2009 s/d. tahun 2010, dan pernah menulis beberapa buku di antaranya: Manajemen Sumber Daya Manusia (Sebuah Strategi, Perencanaan, dan Pengembangan); Komunikasi Organisasi; Kewirausahaan (Teori dan Praktis); Keuangan Negara; Perilaku Organisasi; Usaha-usaha Milik Negara; SDM dalam Organisasi; Statistika Pendidikan; Metode Penelitian Bisnis; Pengantar Kewirausahaan Seri 1 dan Seri 2; Analisis Jabatan; Metode Penelitian Administrasi; Kapita Selekta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penulis pernah bekerja didunia bisnis tepatnya di PT. Nam Buana Persada sebuah perusahaan distributor PT. Unilever Indonesia di bagian pemasaran tahun 1998. Selain dunia akademik, penulis juga tercatat sebagai Penyuluh dan Penggerak, Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) diorganisasi Satuan Tugas (Satgas) Narkotika – Cakrawala Indonesia, serta penyuluh Anti Korupsi yang berlisensi **BNSP** dari **LSP-KPK**.

Jose da Costa Magno, M.RI



Penulis adalah seorang Dosen tetap Pada Universidade Nacional Timor-Lorosa'e, perjalanan karier akademik dimulai pada tahun 2000, sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Nasional Timor Lorosa'e (UNTL). Pada masa awal mengajar (2000–2002), mengampu sejumlah mata kuliah dasar dalam bidang politik. Dua tahun kemudian, diangkat menjadi Ketua Jurusan

Pembangunan Masyarakat (2002–2005). Posisi ini memberikan peluang untuk berperan langsung dalam memperkuat kapasitas lokal dan membangun partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional pascakemerdekaan. Dedikasinya yang kuat terhadap pengembangan pendidikan, memberikan peluang terpilih pada posisi Dekan FISIP UNTL pada tahun 2005 hingga 2009. Di bawah kepemimpinannya, fakultas mengalami berbagai penguatan, baik dari sisi kurikulum, tata kelola kelembagaan, maupun pembukaan ruang kerja sama dengan mitra-mitra internasional. Ia juga menjadi salah satu figur penting dalam mendorong transformasi pendidikan sosial-politik di lingkungan kampus menuju arah yang lebih terbuka dan visioner. Pada tahun 2010-2013, melanjutkan studi pascasarjana di Portugal, mengambil program Master Hubungan Internasional di Universidade do Minho, salah satu universitas unggulan di Portugal dan menyelesaikan , dengan fokus penelitian pada sektor energi dan geopolitik dengan judul *“Segurança Energética: O Caso dos Hidrocarbonetos em Timor-Leste”* yang menelaah dinamika keamanan energi dalam konteks sumber daya alam Timor-Leste. Pada tahun 2014, kembali mengajar di Departemen Hubungan Internasional , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Nasional Timor Lrosa’e . Fokus pada bidang pengajaran mata kuliah Teori Hubungan Internasional dan Metodologi Penelitian Hubungan Internasional. Pada September 2024 dipercaya menjadi wakil dekan urusan Akademik pada FISIP-UNTL.

Dr. Maria Puspitasari



Penulis merupakan dosen tetap di Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia. Menempuh pendidikan S1-S3 di FISIP Universitas Indonesia. Mengajar metodologi penelitian pada Program Studi S3 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Selama belasan tahun mengampu mata kuliah etika komunikasi & komunikasi korporat, termasuk komunikasi krisis dan reputasi di Universitas Multimedia Nusantara dan Institut Bisnis & Komunikasi London School of Public Relations; komunikasi visual di Akademi Televisi Indonesia dan filsafat damai dan resolusi konflik di Universitas Pertahanan. Buku yang ditulis di antaranya *Komunikasi*

Krisis: Strategi mengelola & memenangkan citra di mata publik (2016) dan Taman Arkeologi Onrust: Merentang sejarah pertahanan hingga wisata budaya berkelanjutan (2023). Turut berkontribusi pada 30 book chapter di antaranya: Pancasila di tengah arus kecerdasan buatan (2025); Pengantar ilmu komunikasi (2024); Pemimpin di era digital (2024); Ekonomi politik media (2024); Komunikasi Politik (2023); Cara kerja ilmu filsafat dan filsafat ilmu (2022); Pengantar ilmu komunikasi (2022); Sosiologi ruang publik perkotaan (2023); Perilaku konsumen (2023); Kewirausahaan: pendekatan teoritis (2023); Manajemen pemasaran jasa (2023), Aku cinta desaku: nilai-nilai Pancasila di Desa Citengah untuk PAUD (2022); Dosen berkisah: jangan pernah menyerah (2021); Hidup menjadi cerita: teknologi informasi & komunikasi sebagai sarana untuk menjahit kembali yang putus dan terbelah (2020); dan Ancaman radikalisme dalam negara Pancasila (2016).

Email: mipuspita@gmail.com

Zulkarnain Hamson, S.Sos. M.Si.



Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Lahir di Ambon 27 April 1967. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Komunikasi (Jurnalistik), FISIP Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1996, menyelesaikan S2 pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara (Administrasi Pemerintahan Daerah), UIT Makassar 2016, melanjutkan S3 Ilmu Komunikasi, pada Sekolah Pascasarjana UNHAS angkatan 2023 (sedang menyelesaikan disertasi). Mengawali karier sebagai dosen Luar Biasa (LB) dengan "Mata Kuliah Pengantar Sosiologi" pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Ujungpandang 1999-2000, kini Universitas Negeri Makassar (UNM). Dosen tetap Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar, dan Dosen tetap UIT Makassar 2013-sekarang. Dosen mitra pada Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Ambon, 2023. Menjabat Wakil Rektor IV UVRI Makassar 2018-2019. Wakil Rektor IV UIT Makassar 2019-2021. Mengampu Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, Mata Kuliah Kewarganegaraan, Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi, Mata Kuliah

PENDIDIKAN **ANTI** KORUPSI

(Menciptakan Masa Depan Tanpa Korupsi)



Apriani Riyanti, Ilham Ramadhan Ersyafdi, Murni Parembai,
Yanti Amelia Lewerissa, Supiati, M Zainul Hafizi, Achmad Surya,
Ujang Enas, Jose da Costa Magno, Maria Puspitasari, Zulkarnain Hamson



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

(Menciptakan Masa Depan Tanpa Korupsi)

Pendidikan antikorupsi adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial sejak dini guna mencegah praktik korupsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan tentang bahaya dan dampak korupsi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan sikap antikoruptif dalam diri individu. Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang merusak sistem pemerintahan, melemahkan ekonomi, dan menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, upaya pemberantasannya tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga perlu melalui pendekatan preventif melalui jalur pendidikan. Pendidikan antikorupsi dapat diterapkan dalam berbagai jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, baik sebagai mata pelajaran tersendiri maupun terintegrasi dalam mata pelajaran lain. Materi yang diajarkan meliputi pengertian korupsi, bentuk-bentuknya, dampak negatif, nilai-nilai antikorupsi, serta contoh nyata penerapan integritas dalam kehidupan sehari-hari.



SCANME

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore
Layanan Pembaca & Penilitan Buku
0815-7000-699

Pendidikan & Metodologi Penelitian

ISBN 978-634-246-263-8



9

786342

462638